

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN TERSELUBUNG DI PERDESAAN JAWA TENGAH Analisis Data Sakernas 2007

Dewi Harfina S.*

Abstract

Utilizing the 2007 National Employment Survey (Sakernas), this article aims to explore disguise unemployment in rural areas of Central Java. Several factors related to this issue namely sex, age, education level, household status, marital status and type of occupation were analyzed. Disguise unemployment is an important phenomenon, because it is not only seen from the amount of working hours but also the rate of income, thus disguise unemployment also related to productivity. Based on the 2007 Sakernas, disguised unemployment in rural Central Java are higher than those in rural areas of other Provinces in Java. Generally, this study shows that education level and type of occupation are strongly influence the status of disguise unemployment. The higher education level is the lower chance of an individual to be disguise unemployment. Meanwhile, based on the type of occupation, agricultural workers have a more chance becoming disguise unemployment than the worker in manufacture and service sector. In addition, agriculture also has less productivity rate than other sectors. Thereby, increasing the agricultural productivity in rural Central Java will reduce indirectly the amount of disguise unemployment in this area, which then may improve the welfare of Central Java populations.

Keywords: *Unemployment; productivity; rural areas*

Dengan menggunakan Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) bulan Februari tahun 2007, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengangguran terselubung di perdesaan Jawa Tengah dengan menganalisis beberapa faktor yang berpengaruh. Faktor tersebut antara lain jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, status dalam rumah tangga, status perkawinan, dan jenis lapangan pekerjaan. Permasalahan pengangguran terselubung menjadi penting diperhatikan karena fenomena pengangguran tidak hanya terbatas dari jumlah jam kerja melainkan juga melihat tingkat pendapatan, sehingga pengangguran terselubung juga berkaitan dengan produktivitas. Berdasarkan Sakernas tahun 2007, pengangguran terselubung di perdesaan Jawa Tengah relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan lainnya di provinsi Pulau Jawa. Temuan umum hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan sangat mempengaruhi status penganggur terselubung. Meningkatnya satu jenjang pendidikan akan menurunkan peluang seseorang menjadi penganggur terselubung. Sementara itu, lapangan

* Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI).

pekerjaan di sektor pertanian memiliki peluang yang cukup besar menjadi penganggur terselubung dibandingkan dengan pekerja sektor manufaktur dan jasa. Hal itu berkaitan dengan tingkat produktivitas di sektor pertanian yang lebih rendah. Dengan demikian, peningkatan produktivitas pertanian di perdesaan Jawa Tengah secara tidak langsung akan menurunkan tingkat pengangguran terselubung dan berimplikasi bagi peningkatan kesejahteraan penduduk perdesaan Jawa Tengah.

Kata kunci: Pengangguran terselubung, Produktivitas, Wilayah perdesaan.

PENDAHULUAN

Masalah pengangguran baik di negara maju maupun negara berkembang menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan, terutama berkaitan dengan masalah pembangunan ekonomi. Peningkatan pengangguran diantaranya merupakan akibat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurunkan penyerapan tenaga kerja yang kemudian diikuti dengan meningkatnya pengangguran. Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Meskipun demikian, argumen lain mengemukakan bahwa angka pengangguran tidak selalu berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi karena dalam realitasnya pada saat kondisi pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, tingkat pengangguran juga masih cukup besar. Menurut Harmadi (2007), proses pembangunan suatu bangsa tidak dapat dipandang secara terbatas pada pertumbuhan ekonomi, namun juga harus memuat proses pembangunan manusia. Demikian pula Ananta (1991) menyatakan bahwa angka pengangguran semata-mata merupakan cerminan dari perubahan demografis dan bukan perubahan perekonomian. Dengan kata lain, perubahan ekonomi saja tidak akan mempengaruhi angka pengangguran sehingga variabel non ekonomi menjadi perlu diperhatikan untuk memberikan andil munculnya permasalahan pengangguran.

Selama ini, pengangguran cenderung dilihat dari pengangguran terbuka dan kurang melihat pengangguran terselubung atau setengah pengangguran yang angkanya lebih besar dari pengangguran terbuka. Perkembangan angka pengangguran terbuka di Indonesia selama dua dekade (1971–2000) memperlihatkan penurunan. Akan tetapi, pada sepuluh dekade terakhir (2000–2009) memperlihatkan peningkatan dari 9,87% dengan puncak peningkatan pada tahun 2005 yaitu mencapai 11,24%. Setelah tahun 2005, terjadi penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan menjadi 8,39% (BPS, 2000–2009). Menurunnya angka pengangguran tersebut, tidak menunjukkan membaiknya kondisi ketenagakerjaan. Relatif rendahnya angka pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Indonesia tidak bisa menganggur seperti di negara maju, dimana pengangguran mendapat tunjangan dari negara. Di Indonesia, orang terpaksa harus bekerja untuk menunjang kehidupan keluarganya. Menganggur sepenuhnya merupakan kegiatan ekonomi bernilai tinggi dan membutuhkan dukungan finansial. Oleh karena itu, hanya sebagian kecil saja angkatan kerja yang mampu

menganggur. Selain itu, besarnya kesempatan kerja di sektor informal di Indonesia menyebabkan orang sangat mudah mendapatkan pekerjaan walaupun dengan jam kerja dan pendapatan yang rendah. Kemungkinan lain, relatif kecilnya angka pengangguran di Indonesia adalah pengukuran dari pengangguran terbuka yang hanya menjangkau angkatan kerja yang benar-benar belum memperoleh kesempatan kerja sedikitnya satu jam per minggu sehingga bila bekerja minimal satu jam dalam seminggu tidak terhitung sebagai penganggur (terbuka).

Fenomena pengangguran terbuka umumnya terjadi di wilayah perkotaan karena semakin sempitnya kesempatan kerja di sektor industri. Berdasarkan data Sakernas tahun 2000, tingkat pengangguran di perkotaan mencapai 9,2% dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 menjadi 12,39% (BPS, 2000–2007). Di sisi lain, pengangguran terbuka di perdesaan cenderung lebih rendah, akan tetapi memperlihatkan tingkat setengah pengangguran yang lebih besar dibandingkan di wilayah perkotaan. Berdasarkan data Sakernas 2009, angka setengah pengangguran di perdesaan (35,45%) lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran di perkotaan (16,50%). Sektor pertanian di perdesaan merupakan sektor pekerjaan dominan dan masih menjadi sumber kesempatan kerja dan buruh petani yang potensial. Hal tersebut semakin memperkuat bahwa orang perdesaan tidak mungkin menganggur karena apabila ia menganggur maka ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk perdesaan yang bekerja di sektor pertanian pada umumnya memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan yang bekerja. Menurut Rusastra dan Suryadi (2004 : 98), petani masih memiliki tingkat produktivitas rendah sehingga perlu dilakukan perbaikan sistem satak dan pengupahan, mobilitas dan informasi tenaga kerja, serta pengembangan agroindustri dan kesempatan kerja di luar sektor pertanian.

Penduduk yang bekerja dengan produktivitas rendah atau sering dikenal dengan penganggur terselubung atau setengah penganggur memiliki jam kerja per minggu yang lebih rendah. Menurut Ananta (1991), pengertian tidak bekerja penuh dapat mempunyai dua arti, yaitu belum digunakan semua kemampuan pekerja tersebut atau adanya penghargaan dalam wujud nilai ekonomi yang terlalu kecil untuk pekerjaan yang dilakukan. Di Indonesia, banyak pekerja yang bekerja dengan jam kerja yang panjang akan tetapi penghasilan yang diterimanya sedikit. Sebaliknya, ada pula yang bekerja dalam waktu yang relatif pendek tetapi mendapatkan penghasilan yang tinggi. Oleh karena itu, pengangguran terselubung tidak diukur menurut jam kerja per minggu, tetapi diukur langsung dari penghasilan per jam atau per hari. Melihat fenomena diatas, timbul pertanyaan siapakah mereka yang menganggur secara terselubung, dan faktor apa saja yang mempengaruhi orang menganggur terselubung?

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji gambaran mengenai pengangguran terselubung di perdesaan Jawa Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pengangguran terselubung yang dilihat berdasarkan variabel sosial ekonomi dan demografi, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, status dalam rumah tangga, status perkawinan, dan jenis pekerjaan.

Tulisan ini menggunakan data Survei Sosial Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2007 bulan Februari yang dilakukan oleh BPS di pedesaan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, namun mempunyai tingkat pengangguran terselubung yang cukup besar.

Analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis regresi logistik untuk mempelajari hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Status pengangguran yang merupakan variabel terikat dalam tulisan ini adalah penganggur terselubung dan bukan terselubung, sedangkan faktor demografi yang diperhatikan sebagai variabel bebas adalah umur, jenis kelamin, status perkawinan, status dalam rumah tangga, tingkat pendidikan, dan pekerjaan yang dilihat dari status pekerjaan, lapangan pekerjaan dan jenis pekerjaan. Status pekerjaan dibedakan berdasarkan status formal dan informal, lapangan pekerjaan dikelompokkan menjadi sektor pertanian, manufaktur dan jasa, sedangkan jenis pekerjaan dilihat menurut *skill* dan *unskill*. Pengujian regresi logistik dimaksudkan untuk mendapatkan nilai probabilitas masing-masing variabel bebas dengan pembatasan nilai-p sama dengan 0,05. Analisis regresi logistik menggunakan *odd ratio* untuk melihat perbedaan resiko antar kelompok individu (Agung, 2004).

DEFINISI DAN PENGUKURAN PENGANGGURAN TERSELUBUNG

Secara umum, terjadinya pengangguran merupakan akibat dari ketidakseimbangannya antara penawaran dan permintaan tenaga kerja baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pengangguran merupakan dampak dari terbatasnya kesempatan kerja dan kurang sesuainya kualifikasi tenaga kerja dengan permintaan.

Sesuai dengan konsep dan definisi Survei Angkatan Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik, penduduk dikelompokkan menjadi dua yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja meliputi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan bekerja, dan mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Mereka yang mempunyai pekerjaan sementara tidak bekerja atau mereka yang sedang menyiapkan suatu usaha dan mereka yang tidak bekerja, atau sedang tidak mencari pekerjaan dan tidak yakin mendapatkan pekerjaan dikategorikan sebagai angkatan kerja. Kelompok yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain, termasuk pensiunan dan cacat tubuh.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau dapat dikatakan pengangguran adalah orang yang *full timer* mencari pekerjaan atau orang yang sedang mempersiapkan usaha atau mereka yang sudah mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja. Selain itu, pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mencari

pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Ukuran yang digunakan adalah angka pengangguran terbuka, yaitu persentase angkatan kerja yang mencari pekerjaan terhadap angkatan kerja seluruhnya, konsep ini didasarkan pada pendekatan *Labor force*. Sebenarnya, pendekatan ini mempunyai kelemahan karena dari klasifikasi yang diajukan belum menggambarkan masalah ketenagakerjaan yang sebenarnya. Angka pengangguran terbuka kurang tepat untuk menganalisis masalah ketenagakerjaan di negara berkembang, angka ini lebih sesuai untuk negara maju (Ananta, 1991).

Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia digunakan pendekatan pemanfaatan angkatan kerja yang diajukan oleh Sullivan, and Hauser (1979). Pendekatan ini melihat aspek jumlah jam kerja, besar pendapatan maupun aspek pendidikan terakhir yang ditamatkan. Pendekatan ini membagi angkatan kerja menjadi beberapa kelompok, yaitu angkatan kerja yang telah dimanfaatkan secara ekonomi dan mereka yang kurang dimanfaatkan. Berdasarkan pendekatan jumlah jam kerja apabila seseorang bekerja kurang dari sejumlah jam kerja normal akan menghasilkan pekerja yang kurang dimanfaatkan. Sedangkan berdasarkan aspek pendidikan, akan diketahui apakah jenis pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan pendidikan yang ditamatkan.

Di negara berkembang seperti Indonesia, masih banyak tenaga kerja yang belum dimanfaatkan secara memadai (*underutilization*) yang dikenal sebagai pengangguran tak kentara atau setengah pengangguran. Untuk menghitung tingginya tingkat setengah pengangguran Sullivan and Hauser (1979) mengemukakan konsep "*Labor Utilization Framework*". Setengah pengangguran merupakan refleksi dari penduduk yang bekerja tetapi tidak dimanfaatkan secara penuh. Pemanfaatan tidak penuh tersebut dapat didasarkan atas pendapatan, jam kerja dan kesesuaian pendidikan dan jenis pekerjaan. Ketiga ukuran tersebut menggambarkan produktivitas angkatan kerja. Dengan kata lain setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja dengan jam kerja yang kurang, mereka yang bekerja dengan jam kerja cukup tetapi pendapatan kurang dan mereka yang walaupun jam kerja dan pendapatannya cukup tetapi tingkat pendidikannya lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang dibutuhkan dalam pekerjaannya.

Konsep setengah pengangguran menurut BPS, terbagi menjadi tiga kelompok. Ketiga kelompok tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Setengah pengangguran kentara adalah orang yang bekerja dengan jumlah jam kerja di bawah jam normal.
- 2) Setengah pengangguran tak kentara adalah orang yang bekerja memenuhi jam kerja normal, namun ia bekerja pada jabatan/posisi yang sebetulnya membutuhkan kualifikasi/kapasitas di bawah yang ia miliki.
- 3) Setengah pengangguran potensial adalah orang yang bekerja memenuhi jam kerja normal dengan kapasitas kerja normal, namun menghasilkan *output* yang rendah yang disebabkan oleh faktor-faktor organisasi, teknis dan ketidakcukupan lain pada tempat/perusahaan tempat ia bekerja.

Adanya keterbatasan data yang tersedia sehingga sulit untuk mengukur setengah pengangguran berdasarkan upah, produktivitas dan pendapatan. Oleh karena itu, tulisan ini menggunakan definisi pengangguran terselubung berdasarkan jam kerja serta pendapatan, yaitu yang bekerja kurang dari jam normal (35 jam per minggu) dengan penghasilan bersih per bulan kurang dari garis kemiskinan di perdesaan per kapita per bulan. Garis kemiskinan merupakan standar dasar yang digunakan untuk mengukur minimal pengeluaran yang dibutuhkan penduduk di perdesaan. Penggunaan garis kemiskinan digunakan untuk mengukur batas kemampuan per kapita per bulan yang diperoleh dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPS. Berikut ini adalah perkembangan besar garis kemiskinan perdesaan di Pulau Jawa.

Tabel 1. Perkembangan Garis Kemiskinan Perdesaan di Pulau Jawa (2002–2007)

Garis Kemiskinan Perdesaan (RP/bulan/kapita)						
	2002 ^a	2003 ^a	2004 ^a	2005 ^a	2006 ^a	2007 ^b
Jawa Barat	96,455	99,969	122,475	113,964	157,664	144,204
Jawa Tengah	97,310	103,700	116,998	120,115	160,753	140,803
DI Yogyakarta	103,012	106,801	114,671	130,807	187,521	156,349
Jawa Timur	96,962	112,855	119,405	115,272	155,080	140,322
Banten	93,810	107,311	115,988	108,855	140,648	140,885
Indonesia	96,512	105,888	108,725	117,365	135,896	146,837

Keterangan:

a. BPS (2002b, 2003, 2004, 2006). Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002–2006.

b. BPS (2008). Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia Maret 2008

KEADAAN ANGKATAN KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Menurut data Sakernas 2007, tingkat partisipasi angkatan kerja di perdesaan Jawa Tengah (73,28%) lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja di perkotaan (68,29%). Akan tetapi, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Sebaliknya tingkat pengangguran tak kentara (yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu) di perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Hal yang sama juga terlihat dari tingkat pengangguran terselubung. Keadaan tersebut jelas memperlihatkan bahwa penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan cenderung menjadi pengangguran karena keterbatasan lapangan kerja di perkotaan sehingga memaksa mereka untuk menganggur. Sebaliknya, di perdesaan mencerminkan kesempatan kerja relatif lebih besar untuk bekerja akan tetapi dengan jam kerja yang relatif rendah dan pendapatan yang rendah juga sehingga pengangguran di perdesaan lebih bersifat semu hanya akibat dari jam kerja dan pendapatan. Keadaan itu berbeda dengan keadaan pekerja di perkotaan yang cenderung mempunyai jam kerja tinggi dan pendapatan yang relatif besar namun memiliki peluang kerja yang sangat terbatas (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Statistik Keadaan Angkatan Kerja Jawa Tengah, 2007

	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Pengangguran Terbuka	Pengangguran tak kentara (<35 jam perminggu)	Pengangguran terselubung (<35 jam per minggu dan pendapatan kurang dari Rp. 140.843/bulan)
Perkotaan	68,30	9,67	21,91	16,07
Perdesaan	73,29	7,07	38,64	29,51
Jawa Tengah	71,22	8,10	32,00	24,18

Sumber: Diolah dari data Sakernas 2007

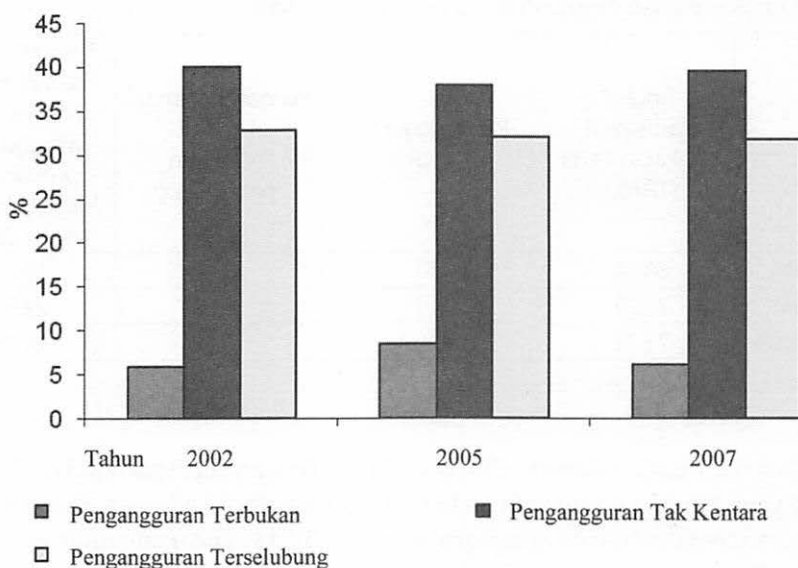
Berdasarkan data Sakernas 2007, di Jawa Tengah terdapat 14.593.766 jiwa penduduk yang berusia produktif dan bertempat tinggal di pedesaan, dengan 6,13% pengangguran terbuka (*open unemployment rate*), 39,41% pengangguran tak kentara (*underemployment rate*), dan 31,66% pengangguran terselubung (*disguised unemployment rate*). Dibandingkan dengan pedesaan lainnya, tingkat pengangguran terselubung pedesaan di Provinsi Jawa Tengah relatif lebih tinggi dibanding dengan provinsi lain di Pulau Jawa (Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Banten), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran terselubung di pedesaan Jawa Timur (Tabel 3).

Tabel 3. Statistik Keadaan Angkatan Kerja Perdesaan di Pulau Jawa, 2007

Propinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Tak Kentara	Tingkat Pengangguran Terselubung
Jawa Barat	11,38	35,65	24,70
Jawa Tengah	6,14	39,42	31,66
DI Yogyakarta	3,01	28,24	25,96
Jawa Timur	4,92	42,54	34,66
Banten	15,70	33,87	24,16

Sumber : Diolah dari data Sakernas 2007

Dengan menggunakan definisi pengangguran terselubung seperti yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka tingkat pengangguran terselubung pedesaan Jawa Tengah dari tahun 2002 sampai dengan 2007 tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan. Akan tetapi, jumlah atau angka absolut penganggur terselubung memperlihatkan peningkatan dari 3,16 juta jiwa pada tahun 2002 menjadi 3,31 juta jiwa pada tahun 2007. Dilihat dari tingkat pengangguran terbuka, jelas memperlihatkan tren yang menurun, akan tetapi terjadi hal yang sebaliknya dengan tingkat pengangguran tak kentara (*underemployment*) yang cenderung mengalami peningkatan antara tahun



Gambar 2. Perkembangan Tingkat Pengangguran Perdesaan Jawa Tengah (2002–2007)

Sumber : Diolah dari Data Sakenas 2007

2002 sampai dengan 2007 (Lihat Gambar 2). Secara umum rata-rata jam kerja per minggu penduduk usia kerja di Indonesia adalah 38 jam per minggu, lebih rendah dari rata-rata jam kerja per minggu di perdesaan Indonesia yaitu 47 jam per minggu (Sugiyarto, 2007). Keadaan tersebut dapat menggambarkan pengangguran terselubung umumnya terjadi di perdesaan dengan jumlah kerja yang rendah dan tingkat pendapatan (upah) yang rendah pula.

PENGANGGURAN TERSELUBUNG DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH

Faktor sosial demografi penduduk berpengaruh terhadap status pengangguran terselubung. Pengaruh faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jenis Kelamin

Dilihat dari jenis kelamin, proporsi pengangguran terselubung perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Besarnya proporsi perempuan yang menganggur sejalan dengan yang dikemukakan oleh Cendrawati (2000) bahwa secara absolut pengangguran perempuan lebih rendah daripada pengangguran laki-laki, namun dalam kenyataannya tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi. Probabilitas tenaga kerja perempuan menjadi pengangguran terselubung mencapai 2,3 kali lebih besar daripada laki-laki. Tingginya angka pengangguran terselubung perempuan dibandingkan dengan

laki-laki, kemungkinan disebabkan kebanyakan laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga dan sebagai sumber pendapatan utama keluarga sehingga dalam kondisi tersebut, sulit bagi laki-laki tidak bekerja. Selain itu, kemungkinan keterbatasan jenis pekerjaan bagi perempuan, perlakuan diskriminasi dari pengusaha terhadap perempuan serta hambatan sosial budaya tertentu merupakan faktor penyebab tingginya proporsi pengangguran terselubung perempuan. Menurut Nasikoen (1990) dalam Cendrawati (2000) bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi peluang kerja perempuan, yaitu:

- (1) Prioritas laki-laki menduduki posisi *breadwinners*
- (2) Tingkat pendidikan perempuan yang lebih rendah yang merupakan akibat dari struktur ekonomi dan norma-norma masyarakat yang menghambat kesempatan pendidikan perempuan
- (3) Pembatasan kultural bagi perempuan untuk bekerja dengan laki-laki yang bukan muhrimnya mengakibatkan kurangnya permintaan tenaga kerja perempuan
- (4) Mempekerjakan perempuan adalah mahal karena harus menyediakan sejumlah jaminan sosial
- (5) Tingkat absensi pekerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
- (6) Lokasi sektor modern yang jauh dari lingkungan tempat tinggalnya memerlukan jam dan waktu yang lebih panjang.

Selain itu, status di dalam rumah tangga dan status perkawinan sangat signifikan mempengaruhi seorang berisiko menjadi pengangguran terselubung. Seorang ibu rumah tangga memiliki risiko menjadi pengangguran terselubung yang cukup besar, 1,6 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga. Risiko menjadi pengangguran terselubung bagi yang belum menikah lebih besar satu kali daripada yang berstatus menikah. Faktor status perkawinan dan status di dalam rumah tangga menjadi sangat penting. Adanya peran perempuan yang lebih besar dalam rumah tangga mengakibatkan perempuan yang telah menikah harus memegang peran ganda, yaitu sebagai perempuan bekerja dan orang yang melaksanakan tugas dalam rumah tangga. Dengan pertimbangan tanggung jawab ganda tersebut ibu rumah tangga yang bekerja memiliki karakteristik tingkah laku yang berbeda dengan pekerja laki-laki sehingga dalam pemilihan jenis pekerjaan yang fleksibel disesuaikan dengan aktivitas dalam rumah tangga. Dalam keadaan tersebut, ketidakserasian antara peran perempuan yang harus memilih antara bekerja atau mengurus rumah tangga. Perempuan yang telah menikah cenderung memilih pekerjaan yang tidak menyita waktu agar dapat tetap mengurus rumah tangganya. Sebaliknya, laki-laki telah menikah termotivasi untuk bekerja karena tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga sehingga alternatif untuk memilih pekerjaan menjadi terbatas. Dengan demikian, perempuan yang telah menikah dan memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga memiliki peluang terpapar menjadi pengangguran terselubung yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang belum menikah.

Tingkat Pendidikan

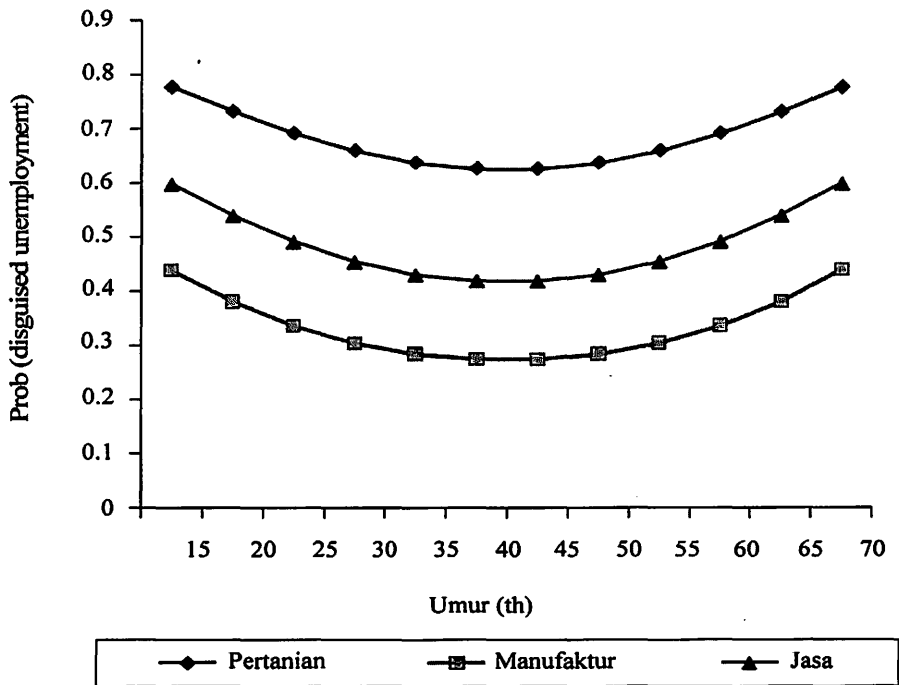
Pendidikan merupakan investasi bagi manusia yang akan dirasakan manfaatnya dimasa yang akan datang. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dengan meningkatnya pendidikan, diharapkan mampu mendapatkan pekerjaan dengan upah yang relatif tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan tinggi lebih memilih menganggur daripada bekerja dengan upah yang kecil dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Keadaan sebaliknya, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memilih sektor tradisional dengan tingkat produktivitas yang tidak maksimal.

Berdasarkan data Sakernas tahun 2007, proporsi pengangguran terselubung perdesaan di Jawa Tengah mencapai 33,36% yang terdiri dari 38,9% dengan tingkat pendidikan tidak sekolah/tidak tamat SD, 32,1% tamat SD, dan 31,4% tamat SMP ke atas. Hasil analisis inferensial memperlihatkan bahwa peluang tenaga kerja yang berpendidikan tamat SD menjadi penganggur terselubung semakin rendah dibandingkan dengan yang tidak sekolah atau tidak tamat SD, dengan besar peluang 0,95 kali. Dengan meningkatnya pendidikan dari tingkat dasar ke tingkat pendidikan menengah menyebabkan semakin meningkatnya probabilitas menjadi pengangguran terselubung dengan besar peningkatan mencapai satu kali dari tenaga kerja yang berpendidikan rendah (tidak sekolah/tamat SD). Ngadi (2005) juga menemukan bahwa pada umumnya setengah pengangguran terjadi pada tingkat pendidikan rendah yang menggambarkan produktivitas yang rendah. Sejalan dengan penelitian Soetomo (1984), di negara berkembang pada umumnya kurva tingkat pengangguran berbentuk U terbalik, dimana tingkat pengangguran tenaga kerja untuk tingkat pendidikan SD relatif rendah, kemudian kembali meningkat pada tingkat pendidikan SLTA dan menurun kembali pada tingkat pendidikan diploma/perguruan tinggi. Tingginya pengangguran terselubung perdesaan di Jawa Tengah pada tingkat pendidikan lebih tinggi diduga karena tenaga kerja di perdesaan Jawa Tengah yang berpendidikan rendah sulit memperoleh kesempatan kerja di sektor formal sehingga mereka memilih bekerja ke sektor informal, termasuk sektor pertanian dan jasa. Disisi lain, meningkatnya tingkat pendidikan mengakibatkan seseorang lebih memilih jenis pekerjaan sehingga untuk itu orang yang berpendidikan tinggi memilih menjadi pengangguran terselubung untuk menghindari sebagai penganggur yang tidak bekerja.

Umur Tenaga Kerja

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi penganggur terselubung. Proporsi penduduk berusia muda (15–19 tahun) yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu memiliki tingkat pengangguran terselubung yang lebih besar (36,68%) dibandingkan dengan penduduk yang berusia 20 sampai dengan 39 tahun. Gambar 3 memperlihatkan bahwa pola umur membentuk U yang artinya bahwa

peluang seseorang untuk menjadi pengangguran terselubung tinggi pada usia muda (15–19 tahun) dan menurun dengan bertambahnya usia. Ketika umur mencapai 40–49 tahun peluang seseorang menjadi pengangguran terselubung kembali meningkat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Soeprobo (2002) yang menyatakan bahwa usia muda merupakan puncak tinggi pengangguran dan bertambahnya umur dan tanggung jawab dalam kehidupan mengakibatkan orang memilih untuk tidak menganggur. Bila dikaitkan dengan produktivitas tenaga kerja maka jelas terlihat bahwa usia muda merupakan usia dengan produktivitas rendah, dengan bertambahnya umur dan meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup maka tenaga kerja cenderung akan meningkatkan produktivitasnya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Akan tetapi, peningkatan umur tenaga kerja kembali menurunkan produktivitas tenaga kerja sehingga probabilitas terpapar menjadi pengangguran terselubung semakin meningkat.



Gambar 3. Pola Probabilitas Pengangguran Terselubung Terhadap Umur

Asumsi : Tenaga kerja perempuan, berstatus menikah dan bukan sebagai KRT, dengan tingkat pendidikan tidak sekolah/tidak tamat SD yang bekerja status informal dan tidak mempunyai keterampilan.

Sumber : Dihitung dari Tabel 5 (Lampiran)

Lapangan Pekerjaan

Secara umum, pekerjaan diklasifikasikan menjadi lapangan pekerjaan, status, dan jenis pekerjaannya. Produktivitas seorang pekerja berkaitan dengan jenis dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan analisis inferensial, sektor pertanian masih merupakan sektor yang memberikan peluang menjadi pengangguran terselubung yang paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya (manufaktur dan jasa) dengan risiko 0,42 kali dibandingkan dengan sektor jasa, dan 0,22 kali dibandingkan dengan sektor manufaktur. Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi di perdesaan. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB semakin memperlihatkan penurunan sehingga mengakibatkan semakin menurunnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian (Supriyati, 2004). Berdasarkan hasil inferensial memperlihatkan tenaga kerja perdesaan di Jawa Tengah memiliki probabilitas menjadi pengangguran terselubung terbesar pada sektor pertanian. Tingginya probabilitas tenaga kerja menjadi pengangguran terselubung di sektor pertanian sangat terkait dengan tingkat upah. Hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Departemen Pertanian menyatakan bahwa tingkat upah di sektor pertanian sangat dinamis dan bervariasi antara jenis kegiatan, gender, sistem pengupahan dan wilayah (Supriyati, Saptana dan Sumedi 2004). Keadaan yang sama juga terjadi di kecamatan Ngadirjo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah (daerah penelitian PPK LIPI pada tahun 2008). Upah tenaga kerja di pertanian di daerah ini sangat tergantung dengan aktivitas pertanian dan gender. Upah mencangkul lahan setengah kali lebih tinggi daripada mengaru, dan upah mengaru setengah kali lebih tinggi daripada mempupuk. Upah laki-laki lebih besar sepertiga kali daripada upah perempuan (Widodo, 2008). Menurut Erwidodo (1993), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat upah, yaitu ketersediaan tenaga kerja, kesempatan kerja, komoditas, luas areal, irigasi, aksesibilitas wilayah, dan ketersediaan kesempatan kerja di sektor non pertanian.

Dilihat dari status pekerjaan, pekerja di sektor informal memiliki peluang menjadi pengangguran terselubung lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan pada sektor formal. Keterikatan aturan kerja di sektor formal dengan ikatan hubungan yang kuat antara buruh dan pemilik usaha mengakibatkan tidak mudah untuk keluar masuk pekerjaan karena keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal. Apabila ditinjau dari tingkat upah, pendapatan dari sektor formal relatif lebih besar dibandingkan sektor informal yang bersifat fluktuatif dan tergantung dengan kondisi tertentu. Keadaan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Pusat Studi Ekonomi Departemen Pertanian (1995–2004) yang menyatakan bahwa kegiatan pertanian masih memberikan kesempatan kerja yang cukup baik, khususnya di desa yang berbasis lahan sawah, meskipun dengan pendapatan dan produktivitas yang relatif fluktuatif (Rusastra, dkk, 2005). Dengan demikian, kegiatan di sektor informal baik di sektor pertanian dan non pertanian masih menjadi idola bagi penduduk di perdesaan karena kesempatan kerja yang besar sehingga meskipun dengan pendapatan yang relatif lebih rendah namun masih memberikan kehidupan penduduk di perdesaan.

Tingkat keahlian yang rendah (*unskill*) atau lebih dikenal dengan sebutan buruh kasar, pada umumnya merupakan tenaga kerja dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang rendah pula, akan tetapi memberikan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Menurut Ehrenberg and Smith (1994), semakin tinggi keahlian seseorang yang dilihat dari lamanya pendidikan, semakin tinggi pula pendapatan yang akan diperoleh. Dengan demikian, seseorang yang memiliki keahlian (*skill* atau *professional*) memiliki risiko menjadi pengangguran terselubung yang lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (*unskill*). Tenaga kerja yang memiliki keahlian memiliki risiko 0,78 kali lebih dari tenaga kerja tak memiliki keahlian. Keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja sangat mempengaruhi tingkat upah yang diperoleh. Peningkatan upah diharapkan mampu menyejahterakan tenaga kerja dan kehidupannya. Secara makro, keadaan tersebut akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, setengah pengangguran bahkan terselubung.

KESIMPULAN

Tingkat pengangguran terselubung di Jawa Tengah relatif lebih besar di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan, sedangkan keadaan sebaliknya terjadi pada tingkat pengangguran terbuka. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk perdesaan tidak dapat sepenuhnya menganggur. Keterpaksaan dalam pemenuhan ketahanan ekonomi rumah tangga, memaksa penduduk perdesaan untuk tetap bekerja meskipun dengan tingkat upah yang lebih rendah. Terbatasnya kesempatan kerja yang layak dan produktif semakin memperlemah posisi tawar tenaga kerja di perdesaan.

Berdasarkan karakteristik demografi, pengangguran terselubung adalah perempuan yang bukan berstatus kepala rumah tangga atau belum menikah. Laki-laki dengan status sebagai kepala rumah tangga umumnya bekerja dengan jam kerja yang lebih penuh meskipun harus bekerja lebih dari dua jenis pekerjaan guna mencukupi dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota rumah tangga. Tanggung jawab kepala rumah tangga akan kesejahteraan anggota rumah tangga memaksa mereka untuk tidak menganggur dan bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Dilihat dari tingkat pendidikan, pada tingkat pendidikan dasar (tamat SD) probabilitas tenaga kerja menjadi pengangguran terselubung lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan rendah (tidak sekolah/tidak tamat SD). Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan tenaga kerja (pendidikan menengah) akan kembali meningkatkan peluang pengangguran terselubung. Dilihat dari umur tenaga kerja, maka pada umur muda probabilitas menjadi pengangguran terselubung tinggi, dengan bertambahnya umur dan tanggung jawab sosial maka probabilitas tersebut semakin menurun. Akan tetapi, probabilitas menjadi pengangguran terselubung akan kembali meningkat setelah umur mencapai 40 tahun sampai dengan 45 tahun.

Wilayah perdesaan di Jawa Tengah mempunyai kesempatan kerja di sektor pertanian relatif besar, dibandingkan dengan sektor non pertanian, meskipun sektor pertanian memberikan tingkat pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya, namun sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian sebagai sumber penghasilan dan kesejahteraan penduduk perdesaan. Dengan kondisi tersebut, tak mengherankan apabila pengangguran terselubung di perdesaan yang bekerja di sektor pertanian relatif lebih besar, dibandingkan dengan yang bekerja di sektor non pertanian. Tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian umumnya dengan tingkat keahlian yang rendah (*unskill*) sehingga resiko menjadi pengangguran terselubung menjadi lebih besar dibandingkan tenaga kerja lain yang bekerja di sektor non pertanian dengan tingkat keahlian tertentu (*skill* atau profesional) pada pekerjaan formal dengan jumlah jam kerja yang cenderung stabil dibandingkan dengan petani dan buruh tani.

Langkah strategis yang dapat dilakukan berkaitan dengan pengangguran terselubung di perdesaan dapat dilakukan melalui pengembangan usaha tani, komoditas komersil yang bersifat padat tenaga kerja, usaha-usaha konsolidasi lahan dan manajemen usaha tani, serta pengembangan dan pendalaman agroindustri berbasis bahan baku setempat (Saptana, Sumedi dan Supriyati, 2004). Hal itu sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas pertanian yang secara tidak langsung akan menurunkan tingkat pengangguran terselubung di perdesaan. Pemahaman cara bertani yang baik dan ramah bagi lingkungan akan memberikan hasil produksi pertanian yang semakin meningkat pula. Selain itu, pengetahuan cara pengolahan pasca panen bagi penduduk perdesaan adalah petani tidak hanya terpaku pada penjualan hasil panen namun hasil olah lebih lanjut yang akan meningkatkan nilai ekonomi secara tidak langsung tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk perdesaan. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat kesejahteraan penduduk di perdesaan Jawa Tengah akan semakin meningkat dan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. Gusti Ngurah. 2004. *Statistika : Pengantar Metode Analisis untuk Tabulasi Sempurna dan Tak Sempurna dengan SPSS*. Edisi kedua. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Ananta, Aris. 1991. *Beberapa Skenario Ketenagakerjaan Indonesia 1990 : Suatu Pendekatan Baru*. Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2000. *Survei Angkatan Kerja Nasional Bulan Agustus 2002*. Jakarta: BPS.
- . 2002a. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002*. Jakarta: BPS.
- . 2002b. *Survei Angkatan Kerja Nasional Bulan Agustus 2002*. Jakarta: BPS.

- . 2003. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003*. Jakarta: BPS.
- . 2004. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2004*. Jakarta: BPS.
- . 2005. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2005*. Jakarta: BPS.
- . 2006. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2006*. Jakarta: BPS.
- . 2007. *Survei Angkatan Kerja Nasional Bulan Agustus 2007*. Jakarta: BPS.
- . 2008. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia Maret 2008*. Jakarta: BPS.
- . 2009. *Survei Angkatan Kerja Nasional Bulan Februari 2009*. Jakarta: BPS.
- Cendrawati, Nur Kartika. 2000. “Analisis Pengangguran di Indonesia Berdasarkan Data Sakerti 1993”. Tesis. Program Pascasarjana Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia. Depok.
- Ehrenberg, R.G and R.S. Smith. 1994. *Modern Labor Economics*. Fifth Edition. New York, NY: Harper Collins.
- Erwidodo. 1993. *Evaluasi perkembangan tingkat upah di sektor pertanian*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.
- Harmadi, S. H. B. (2007). “Pengangguran, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. *Warta Demografi*. 37. (3). Lembaga Demografi FE-UI. Depok.
- Nachorwi, D. N. & H. Usman. 2002. *Penggunaan Teknik Demografi : Pendekatan populer dan Praktis dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan data dengan menggunakan Paket Program SPSS*. Cetakan pertama. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Ngadi. 2005. “Pengangguran terbuka dan setengah pengangguran di Indonesia periode 1996-2004: konsep, isu dan implikasi kebijakan”. *Warta Demografi*. 35 (4). Lembaga Demografi FEUI. Depok
- Rusastra, I. W dan M. Suryadi. 2004. “Ekonomi Tenaga Kerja Pertanian dan Implikasinya dalam Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Buruh Tani”. *Jurnal Litbang Pertanian* 3 (23). (www.pustaka-deptan.go.id/publikasi/p3233043.pdf).
- Rusastra, I. W dkk. 2005. “Analisis Ekonomi Ketenagakerjaan Sektor Pertanian dan Perdesaan di Indonesia”. Laporan Eksekutif. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. (www.pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/LHP_IWR_2005.pdf).
- Soeprbo, T. B. 2002. *Indonesia Youth Employment*, Prepared for ILO/Japan Tripartite Regional Meeting on Youth Employment in Asia and the Pacific Bangkok, 27 February–1 March 2002.
- Sugiyarto, G. 2007. *Measuring Underemployment : Establishing the Cut off Point*. ERD Working paper no. 92. Asian Development Bank. Philippines.

- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Edisi Ketiga. PT. Rajagafindo Persada. Jakarta.
- Sullivan, T. A. and P. M. Hauser. 1979. *The Labor Utilization Framework : Assumptions, Data, and Policy Implications*. National Commission on Employment and Unemployment Statistics. Washington, DC. (<http://159.226.42.47/cmu2/cmu-114/31036963/31036963.pdf>).
- Supriyati, Saptana dan Sumedi. 2004. *Dinamika Ketenagakerjaan dan Penyerapan tenaga Kerja di perdesaan Jawa (kasus di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur)*. *Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness*. Vol 4 No. 2. Universitas Udayana. Bali. (<http://ejurnal.unud.ac.id>).
- Suryadarma, Daniel , A. Suryahadi & S. Sumarto. 2005. *The measurement and trend of unemployment in Indonesia : The issue of discouraged workers*. Paper. Hotel Borobudur: Jakarta.
- Sutomo, Hedi. 1984. *Pengangguran di Kota, suatu Analisis terhadap Pemuda dan Golongan Kerja dalam angkatan Kerja Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Wahyudi, Hidayat. 2004. "UKM dan Upaya Mengatasi Pengangguran". *Warta Demografi*. 34 (1). 2004: 31–37. Depok.
- Widodo, dkk. 2008. "Pengangguran Terselubung di Perdesaan Jawa Tengah. Studi Kasus Kabupaten Temanggung". Jakarta: Puslit Kependudukan LIPI.

Lampiran Hasil Analisis Regresi Logistik

Tabel 4. Statistik Variabel-Variabel yang digunakan

Variabel	Mean	Std. Deviation
Pengangguran Terselubung (SPTK)	0.3336	0.47151
Umur (Age)	40.8886	14.72215
Jenis Kelamin (Sex) 1. Laki-laki * 2. Perempuan	0.3921	0.48821
Status Perkawinan (Married) 1. Menikah * 2. Pernah/belum Menikah	0.2178	0.41277
Status di RT (Head) 1. KRT * 2. ART	0.5386	0.49851
Tingkat Pendidikan (Educ) 1. Tidak sekolah/tidak Tamat SD * 2. Tamat SD 3. Tamat SMP dan SMA ke atas	1.4087	0.67598
Status Pekerjaan (STS) 1. Formal * 2. Informal	0.8329	0.37302
Lapangan pekerjaan (Sect) 1. Pertanian * 2. Manufaktur 3. Jasa	1.4963	0.61892
Jenis Pekerjaan (Occp) 1. Skill 2. Unskill *	1.7762	0.41680
Total (N)	9.939.119	

Keterangan : tanda (*) Pembeding

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Logistik

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	AGE	-0.083	0.000	73405.277	1	0.000	0.920
	AGE2	0.001	0.000	92123.309	1	0.000	1.001
	SEX(1)	0.827	0.002	174284.836	1	0.000	2.285
	EDUC			3703.106	2	0.000	
	EDUC(1)	-0.051	0.002	674.970	1	0.000	0.950
	EDUC(2)	0.057	0.002	613.763	1	0.000	1.059
	MARRIED(1)	0.031	0.002	226.704	1	0.000	1.031
	HEAD(1)	0.478	0.002	45744.628	1	0.000	1.613
	STS(1)	-0.154	0.002	3964.301	1	0.000	0.857
	SECT			428872.390	2	0.000	
	SECT(1)	-1.493	0.002	427477.097	1	0.000	0.225
	SECT(2)	-0.850	0.003	61186.996	1	0.000	0.427
	OCCP(1)	-0.241	0.003	8747.598	1	0.000	0.786
	Constant	1.062	0.008	17121.114	1	0.000	2.893

a. Variable(s) entered on step 1: age, age2, SEX, educ2, MARRIED, HEAD, STS, SECT, OCCP.